

KEMANDIRIAN PANGAN DI DAERAH¹.

HM Idham Samawi

Bupati Bantul

Jika ada yang mengatakan bahwa mereka yang menguasai pangan akan menguasai kehidupan, barangkali memang benar. Dalam konteks negara dan perkembangan suatu bangsa, ketersediaan pangan dan *kedaulatan atas pangan*, merupakan pilar penting bagi kedaulatan sebuah bangsa. Oleh sebab itulah, pembahasan masalah pangan, tidak akan pernah kering, sebab masalah ini akan terus berkembang, sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan dan pada sisi yang lain kemampuan dalam penyediaan tidak meningkat secepat peningkatan kebutuhan akan pangan. Pertumbuhan penduduk, menurunnya kemampuan alam dalam memberikan sumber-sumber kehidupan, dan berbagai masalah di kawasan (geopolitik), ikut memberikan pengaruh dan menyumbang kompleksitas persoalan.

Dari kesemuanya itu, kita ingin mengatakan bahwa persoalan pangan, sungguh bukan persoalan yang bersifat sempit dan terpisah dengan masalah-masalah lain, justru sebaliknya. Pembahasan mengenai masalah pangan dengan sendirinya membutuhkan pendekatan yang multi perspektif, dengan maksud agar persoalan dapat "dipotret" dengan utuh, sehingga jawaban yang diberikan benar-benar mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Bagi rakyat sendiri, persoalan pangan dapat ditarik dalam rumusan yang lebih sederhana yakni bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan.

Negara dalam hal ini, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kepentingan rakyat dalam mendapatkan sumber pangan yang cukup dan berkualitas, demi perbaikan kualitas hidupnya. Dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat tentu saja akan menjadi masalah yang sangat serius bagi negara - mempertaruhkan keberadaan bangsa dan juga mempertaruhkan keberadaan

¹ Disampaikan dalam Seminar "Konvergensi Nasional untuk Kemandirian Pangan dan Energi Menuju Kedaulatan Bangsa", dalam rangkaian Dies Natalis IPB ke-45, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 di Gedung IPB International Convention Center (IICC) Baranangsiang Bogor.

pemerintah, sebab jika pemerintah gagal memenuhi ketersediaan pangan, maka hal ini berarti pemerintah gagal menjalankan perintah konstitusi.

Tantangan Pangan.

Salah satu tantangan pangan yang penting adalah masalah ketersediaan yang dikaitkan dengan produksi. Jika kita menengok perkembangan dunia saat ini, maka akan terlihat bagaimana ketatnya kompetisi, terutama dalam konteks menghadapi apa yang sering disebut sebagai *krisis pangan*. Dalam menghadapi ancaman tersebut, seperti yang telah diketahui publik, beberapa negara yang selama ini menjadi produsen utama beras, seperti Vietnam, Thailand, India, dan China, melakukan antisipasi dengan jalan mengurangi atau bahkan menghentikan ekspor. Perkembangan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri, sebab hal ini akan mendorong peningkatan problem ketersediaan pangan, khususnya beras, jika kita tidak memiliki cukup kemampuan dalam memproduksi beras yang dapat memenuhi kebutuhan.

Kita memandang beberapa titik krusial yang perlu mendapatkan perhatian, yakni: *Pertama*, ketersediaan sumber pangan. Jika kita membahas masalah ketersediaan pangan, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pertanian dan sektor pendukung lainnya. Pengalaman kami di daerah menunjukkan bahwa kinerja sektor "pertanian" (dalam arti luas) untuk memproduksi bahan pangan, akan sangat bergantung pada "militansi" dari mereka yang bekerja di sektor "pertanian". Selama "pertanian" tidak dapat menjadi sandaran hidup, selalu merugi, dst, maka sangat kecil kemungkinan kita dapat mendorong peningkatan kinerja sektor "pertanian". Oleh sebab itulah dibutuhkan kebijakan yang *menstimulasi* antusiasme bertani, *subsidi* dan *proteksi*². Keberlanjutan, konsistensi dan sinergi, kebijakan dari

² Pengalaman yang dilakukan antara lain, pengembangan program pemberdayaan petani (miskin, gurem) dan penguatan sektor pertanian (dalam rangka ketahanan pangan), antara lain melalui upaya: kampanye untuk meningkatkan harkat dan martabat petani (*Jangan jual gabah di sawah, jangan jual gabah kalau harganya murah dan juallah beras jangan jual gabah*); penanganan pasca panen (membeli produk petani untuk sejumlah komoditas pertanian, ketika harga anjlog). Bentuk dukungan lain bagi sektor pertanian adalah: program dukungan bagi petani antara lain: support bibit, pupuk dan obat-obatan; hijrah dari pola lama ke pola baru (dari hanya meningkatkan produktivitas, menjadi peningkatan kesejahteraan petani); dan perluasan akses pasar. Selain itu, untuk mengerem laju alih fungsi lahan dan meningkatkan gairah bertani, diupayakan untuk membiayai PBB lahan-lahan pertanian.

pusat sampai daerah, tentu akan menjadi kekuatan strategis dalam rangka membangun ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan.

Kedua, keterjangkauan atau kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangan. Secara ideal, kita memandang bahwa keterjangkauan harus lah memuat makna *mudah, murah* dan *mutu* (berkualitas). Mudah, dalam makna bahwa masyarakat mampu menjangkau. Hal ini mengandaikan adanya sistem pengadaan yang baik - mulai dari jaringan distribusi, transportasi, gudang dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya jalan, menjadi bagian integral dalam memperkuat ketahanan pangan (di daerah). Murah, dalam makna masyarakat lapis bawah dapat menjangkau. Mutu, dalam makna bahwa bahan pangan tersebut, seyogyanya berkualitas baik, bukan sebaliknya.

Di luar kedua masalah tersebut, kita ketahui pula bahwa ketergantungan pada satu jenis bahan tertentu akan menjadi persoalan yang sangat besar, terutama ketika pasokan mengalami penurunan. Program diversifikasi, dalam konteks ini, menjadi sangat penting artinya. Namun demikian, kita tetap punya pandangan bahwa masalah yang lebih krusial menyangkut masalah pangan adalah masalah *kemiskinan*. Kemiskinan menjadi sebab sekaligus akibat - kemiskinan telah menurunkan daya beli dan sebaliknya keadaan gizi yang buruk akan memperlebar jalan mencapai keadaan miskin.

Produksi dan Kesejahteraan Rakyat (Petani).

Tantangan penyediaan bahan pangan yang dikaitkan dengan kecenderungan bangsa-bangsa lain untuk lebih mengutamakan kepentingan dalam negerinya, membuat kita dituntut mampu meningkatkan produksi agar kita memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok (bahan pangan) yang dari waktu ke waktu terus bergerak naik. Kita memandang bahwa ketersediaan bahan pangan merupakan syarat mutlak yang harus diurus oleh negara, dan secara ideal kebutuhan tersebut hendaknya dapat kita produksi sendiri. Pengalaman di masa lalu memperlihatkan bahwa kita sesungguhnya

memiliki kemampuan atau punya potensi yang besar, untuk dapat menyediakan kebutuhan bahan pangan, terutama beras.

Apa yang nampaknya perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa di masa lalu, pencapaian produksi pertanian, sehingga mampu mencapai swasembada beras, dilalui dengan pengutamaan pertumbuhan, dan kurang memberikan perhatian pada kondisi hidup petani. Jika kita melihat dengan lebih kritis, maka akan tampak bahwa dari waktu ke waktu, harga komoditas pertanian, terus mengalami penurunan – harga anjlok ketika musim panen. Kondisi yang demikian, tentu saja sangat merugikan petani, sebab biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk atau dari hasil penjualan komoditas yang dihasilkan. Malah, para pengamat pertanian menghitung bahwa nilai tukar petani, justru dalam posisi terendah ketika swasembada beras dicapai. Tentu saja kondisi yang demikian, bukanlah kondisi ideal yang hendak kita capai. Saat ini dan di masa depan, kita berharap bahwa peningkatan produksi pertanian, secara otomatis juga meningkatkan pendapatan petani dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani.

Keterbatasan Daerah.

Setiap daerah sesungguhnya memiliki tantangan, harapan dan strategi mengubah keadaan yang berbeda-beda. Kenyataan ini hendak mengatakan bahwa setiap daerah, selain memiliki komitmen yang besar dalam mempercepat perbaikan kualitas kehidupan rakyat, namun secara nyata berada dalam berbagai keterbatasan berkait dengan tiga tantangan berikut:

Pertama, apa yang disebut sebagai masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial ini berupa kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lain-lain, baik yang merupakan masalah warisan masa lalu, ataupun masalah yang muncul sebagai akibat dari perkembangan masa kini.

Kedua, apa yang disebut sebagai keterbatasan kemampuan daerah, khususnya daerah yang tidak kaya dengan sumberdaya alam. Apa yang disebut sebagai keterbatasan, dapat dilihat dari belanja daerah yang tidak dapat ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah, dan harus mengandalkan Dana

Alokasi Umum (DAU), dalam mana sebagian besar dana tersebut, terserap untuk keperluan rutin.

Ketiga, rendahnya daya saing daerah. Pengalaman di bawah sistem lama yang sentralistik, memang membuat daerah tidak memiliki motivasi untuk membangun atau memperkuat daya saing. Akibatnya, daerah-daerah tidak terbiasa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggali potensi daerah, dan termasuk mempromosikan daerah, sehingga memiliki daya tarik, terutama untuk keperluan investasi.

Ketiga tantangan ini tentu saja harus dapat dijawab oleh daerah, jika ingin mewujudkan proses transformasi yang membawa kesejahteraan pada rakyat. Untuk itu, setiap daerah harus mampu mengatasi masalah sosial yang ada, meningkatkan kemampuannya dan sekaligus meningkatkan daya saing, terutama dalam memacu gerak (pembangunan) ekonomi daerah, tentu demi terbangunnya kekuatan daerah untuk mempercepat perbaikan kualitas hidup rakyat. Daya gerak daerah, akan sangat bergantung pada kesempatan dan daya dukung yang ada. Di sinilah makna penting suatu kontinuitas, konsistensi dan sinergi kebijakan, dari pusat sampai daerah.

Penguatan Kelembagaan.

Gambaran mengenai masalah kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan, serta keterbatasan daerah, pada dasarnya adalah “latar belakang” yang harus menjadi pengetahuan dalam upaya penguatan jaringan pelayanan. Bagi pemerintah daerah, kemampuan untuk membangun jaringan layanan yang berkualitas, akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari percepatan pengentasan kemiskinan, dan dengan sendirinya menjadi *daya dukung* untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang miskin (tidak mampu).

Makin disadari bahwa masalah pangan tidak mungkin ditangani secara sendiri-sendiri atau eksklusif, dibutuhkan sikap terbuka dan senantiasa membangun kemitraan, terutama memperkuat kemitraan tiga pilar yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Dalam konteks inilah, beberapa prakarsa terus dikembangkan dan diperkuat, antara lain: *Pertama*, penguatan jaringan kerjasama. Terus diupayakan untuk membangun jaringan, baik dengan

kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha. Pemerintah, dalam banyak kesempatan memerankan sebagai fasilitator, atau mengembangkan ruang bagi dialog antar pihak, dalam rangka memperkuat aksesibilitas, status gizi, dan lain sebagainya.

Kedua, pengembangan kebijakan dan pengintegrasian agenda pangan dalam kebijakan daerah. Pemerintah daerah senantiasa berupaya agar tantangan pangan menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah. Upaya ini dipandang penting, terutama untuk memberikan kepastian pada masa depan, dan sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dalam bekerja, sehingga jelas dalam arah dan diharapkan akan jelas hasilnya. Untuk itulah, pemerintah daerah membuka diri dan mendorong partisipasi masyarakat, terutama agar dihasilkan suatu kebijakan yang benar-benar menjawab tantangan dan sejalan dengan aspirasi rakyat.

Ketiga, pengembangan program-program yang diarahkan untuk memperkuat pangan, serta meningkatkan kerjasama antar para pihak. Peningkatan program ini diharapkan pula dapat ikut memicu peningkatan pembiayaan atau belanja untuk kepentingan pangan. Hal yang terus menjadi perhatian adalah upaya untuk meningkatkan sinergi dan sifat yang saling memperkuat, sehingga berbagai aktivitas yang dikembangkan tidak saling menegasi, sebaliknya saling mengisi dan memberi makna.

Di luar itu semua, upaya mengembangkan jaringan pelayanan pangan hendaknya diikuti peningkatan kreativitas dan keswadayaan masyarakat, serta menguatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi bahan pangan. Prakarsa masyarakat dalam menghidupkan lumbung pangan (lumbung desa), diperkuatnya kearifan lokal (dalam maksud memperkuat modal sosial), dan juga prakarsa untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah daerah agar dapat memberikan layanan yang memanusiaikan masyarakat (nguwongke masyarakat), hendaknya diletakkan sebagai bagian dari *strategi nasional* untuk meningkatkan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan, serta kemandirian. Demikian

Jakarta, 30 Oktober 2008